

KEMISKINAN MULTIDIMENSI

Isbandi Rukminto Adi

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

E-mail: adi1126@yahoo.com

Abstrak

Kemiskinan adalah masalah yang tidak ada habisnya dibahas dari generasi ke generasi. Apalagi pascakrisis moneter dan ekonomi yang meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia secara cukup drastis. Artikel ini mencoba membahas masalah kemiskinan secara multidimensi, yang merupakan cara pandang yang digunakan dalam pendekatan pembangunan sosial, yaitu melihat permasalahan dari dimensi mikro, mezzo maupun makro. Di samping itu, artikel ini memberikan tawaran alternatif strategi jangka panjang yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. Strategi tersebut juga meliputi strategi untuk memperbaiki kondisi yang ada melalui perubahan yang dilakukan pada dimensi makro, mezzo dan mikro, seperti telah diuraikan sebelumnya.

Abstract

Poverty is one of many problems that always been discussed from generation to generation. Especially, after the monetary and economic crisis where the number of people who live below poverty line was increased rapidly. This article will discuss the Poverty problems from the multi-dimensional standpoint which has been adopted by the social development approach. This approach view problem from the micro, mezzo and macro dimensions. After discussing several roots of poverty, this article will suggests an alternative strategy which can be undertaken in order to reduce the number of Indonesian people who live below the poverty line. This strategy also include the strategy to improve the existing condition by changing the micro, mezzo, and macro dimensions which has been analysed before.

Keywords: Poverty, and Social Intervention

1. Pendahuluan

Dewasa ini melalui berbagai media massa dapat terbaca dan terlihat tentang meningkatnya berbagai permasalahan yang ada di berbagai kota besar di Indonesia. Masalah yang muncul antara lain: meningkatnya angka penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran, menipisnya sumber air minum, meningkatnya angka kebakaran di musim kemarau, banyaknya daerah yang tertimpa banjir di musim penghujan, meningkatnya jumlah anak jalanan dan pengemis, meningkatnya kasus perampokan, dan sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut seringkali dikaitkan dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sebagai gambaran kasar pada tabel 1.1, di bawah ini disajikan data perbandingan penduduk miskin di Indonesia dan Malaysia.

Diambilnya Malaysia sebagai pembanding karena negara ini mempunyai cukup banyak kesamaan dengan Indonesia, antara lain Malaysia terdiri dari beragam suku bangsa, adanya suku Melayu sebagai suku yang dominan, adanya kemiripan tradisi, dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, Malaysia dulu sering diidentikkan sebagai saudara muda Indonesia, dan Indonesia sebagai saudara tua tempat bangsa Malaysia banyak belajar. Tentunya masih segar dalam ingatan pada awal 1980-an banyak sumber daya manusia dari negeri Jiran (Malaysia) yang belajar di Indonesia. Sekarang setelah sekitar 25 tahun berjalan, tentunya cukup menarik untuk mengkaji kembali bagaimana kondisi Indonesia bila dibandingkan dengan Malaysia, terutama terkait dengan persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Populasi berada Di bawah Garis
Kemiskinan di Indonesia dan Malaysia

Indikator	Indonesia	Malaysia
Persentase Populasi berada di bawah garis kemiskinan (\$1 sehari)	7.5	<2
Persentase Populasi berada di bawah garis kemiskinan (\$2 sehari)	52.4	9.3
Persentase Populasi berada di bawah garis kemiskinan (berdasarkan standar nasional)	27.1	15.5
Pendapatan Domestik Bruto (GDP) per kapita (2003)	\$ 970	\$4,187

(sumber: Human Development Report 2005)

Tabel 1 di atas menggambarkan kondisi keuangan dari masyarakat Indonesia, dalam kaitan dengan tingkat kemiskinan yang ada. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sekitar 52% rakyat Indonesia dapat dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan bila diukur dari standar Bank Dunia yang melihat batas garis kemiskinan adalah \$2 per kepala per hari. Sedangkan di Malaysia, bila menggunakan standar yang sama, maka angka penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan hanya berkisar sekitar 9% dari jumlah populasi. Dari sini tergambar bahwa persentase penduduk miskin (berada di bawah \$2 per kepala per hari) di Indonesia masih sangatlah besar, karena melebihi 50% dari populasi.

Kondisi seperti ini tentunya akan dapat menjadi beban dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Karena, pekerjaan rumah (PR) untuk mengentaskan kemiskinan masih tetap menjadi tantangan yang belum dapat dijawab dengan baik, meskipun telah dikembangkan berbagai modal bantuan keuangan yang notabene ditujukan untuk meningkatkan modal keuangan masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir saja, program-program pengentasan kemiskinan seperti P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Program Pinjaman Modal Usaha dari berbagai departemen dan juga lembaga swadaya masyarakat telah diluncurkan. Tetapi hasilnya angka penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (\$2 per hari per

kepala) tetap masih lebih besar dari 50% jumlah penduduk.

Lalu yang menjadi pertanyaan tentunya adalah bagaimana cara memperbaiki kondisi yang ada? Dalam usaha menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini mencoba memilah-milah masalah sosial yang ada dan mengidentifikasi akar masalah sosial dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas.

2. Metode Penelitian

Dalam kaitan dengan proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang 'tidak mengganggu' (*the unobstrusive research*) atau dikenal pula dengan nama metode penelitian 'non reaktif' (*the non reactive methods*). *The Unobstrusive research method* adalah suatu bentuk penelitian sosial yang dalam prosedur pengumpulan datanya dilakukan tanpa mengganggu mereka yang menjadi subjek penelitiannya. Menurut Kellehear (1993:2) metode ini adalah metode penelitian yang tidak menggunakan teknik wawancara dengan masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Dengan menggunakan metode ini peneliti belajar tentang manusia dan dunia sosialnya tanpa melakukan interupsi guna menanyakan suatu pertanyaan pada mereka (*the unobstrusive method is a research method which does not involve talking with people. In this method, researcher learns about human beings and their social world without interrupting them to ask questions*).

Kellehear (1993:5-7) menggambarkan bahwa metode penelitian ini dalam proses pengumpulan datanya akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui: rekaman dalam bentuk *audio-visual* maupun tulisan (*written and audio-visual records*), budaya material yang ada pada masyarakat (*material culture*), observasi sederhana (*simple observations*) dan pengumpulan data dengan perangkat keras (*hardware techniques*) seperti penggunaan video kamera dan kamera foto (*e.g. using camera and videos*). Metode ini tidak menggunakan teknik pengumpulan data yang konvensional seperti: kuesioner, wawancara, manipulasi eksperimen, maupun berbagai tes (seperti tes psikometri). Keuntungan dari metode ini adalah kemampuan untuk melihat perilaku yang aktual dan bukannya 'perilaku yang dilaporkan sendiri oleh subjek penelitian' (*the 'self-reported' behaviour*). Keuntungan kedua, metode ini pada dasarnya relatif lebih aman baik bagi peneliti maupun pihak yang diteliti, karena observasi yang dilakukan tidak melibatkan kontak fisik ataupun 'kedekatan' terhadap orang lain (*the observation does not involve physical contact or proximity to other people*). Keuntungan yang ketiga adalah penelitian jenis ini dapat dengan dilakukan pengulangan (*this reseach can be easily repeated*), karena penelitian ini tidak 'mengganggu' (*disrupt*) pihak yang sedang diteliti.

Keuntungan keempat adalah memudahkan pihak (peneliti) lain untuk melakukan pengecekan ulang terhadap temuan yang didapat, serta memungkinkan untuk mengkaji keterandalan dan keabsahan dari penelitian tersebut. Keuntungan yang kelima adalah tidak adanya masalah keterjangkauan (akses) karena peneliti jarang sekali membutuhkan kerja sama pihak lain (*access is not usually a problem because the researcher rarely needs the co-operation of others*).

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data *unobstrusive* berdasarkan pada keuntungan yang telah disebutkan di atas. Penelitian ini lebih memfokuskan pada dokumen tertulis baik berupa material tercetak ataupun elektronik (*printed and electronic materials*), serta observasi sederhana tanpa menggunakan pedoman observasi.

3. Analisis Dan Interpretasi Data

3.1. Beberapa Dimensi Yang Terkait Dengan Kemiskinan.

Dalam melihat masalah kemiskinan secara multidimensional, maka kemiskinan dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu:

- dimensi makro; dan
- dimensi mezzo; dan
- dimensi mikro

Di bawah ini akan diuraikan secara singkat temuan yang ada, dikaitkan dengan dimensi yang digunakan untuk menganalisis kemiskinan.

Dimensi Makro: Kesenjangan Pembangunan ‘Desa’-‘Kota’.

Kesenjangan pembangunan antara ‘desa’ (daerah minus) dan ‘kota’ (daerah surplus) merupakan salah satu faktor penyebab utama terciptanya migrasi desa kota yang tak terkendali, yang sering juga disebut sebagai urbanisasi. Pemusatan pembangunan pada kota-kota besar membuat kota-kota besar semakin menjulang sedangkan daerah pedesaan menjadi terpinggirkan. Keadaan seperti ini sudah terjadi tahun 1970-an dan terakumulasi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.

Keadaan seperti ini menyebabkan *human capital* yang potensial dari daerah pedesaan, yang seharusnya difokuskan untuk membangun daerah pedesaan justru ‘mengalir’ ke kota-kota besar dan mereka sebagian besar belum dapat berkompetisi dengan angkatan kerja yang mendapat pendidikan di kota tersebut. Hal ini menyebabkan mereka seringkali belum dapat memasuki ‘alur utama’ dunia pekerjaan, sehingga tenaga kerja dari daerah pedesaan yang belum mempunyai ‘keterampilan yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja’ lebih sering masuk ke sektor informal, ataupun ‘terlempar’ ke ‘jalan’.

Kesenjangan pembangunan desa dan kota bukan saja terlihat dari pembangunan fisik dan ekonomi saja, akan tetapi terlihat juga antara lain pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, teknologi, dan juga sarana hiburan (rekreasional). Kesenjangan pembangunan ‘desa’-‘kota’ ini pada sisi berikutnya akan memunculkan kemiskinan yang multidimensi di mana masalah kemiskinan yang muncul tidak hanya terfokus pada satu dimensi pembangunan saja, akan tetapi sudah melibatkan berbagai dimensi pembangunan

Kesenjangan pembangunan selama 30 tahun lebih membuat masyarakat di daerah ‘lingkar luar pembangunan’ (yang sebagian merupakan daerah pedesaan ataupun beberapa daerah di luar Jawa) menjadi semakin miskin, sedangkan mereka yang mempunyai akses terhadap pembangunan, termasuk di dalamnya aspek ekonomi dan kekuasaan menjadi semakin kuat. Sehingga pada titik tertentu, kemiskinan ini menjadi tenaga pendorong berpindahnya *human capital* dari daerah ‘lingkar luar pembangunan’ untuk masuk ke ‘pusat area pembangunan’. Akan tetapi, karena kesenjangan yang sudah terjadi di berbagai sektor (seperti sudah dijelaskan di *point* pertama di atas) maka tenaga kerja dari ‘lingkar luar’ ini kurang mempunyai daya saing yang kuat dengan mereka yang berasal dari ‘pusat area’. Sehingga terjadilah proses kemiskinan struktural, di mana struktur yang ada membuat masyarakat semakin tersegregasi antara mereka yang berada di ‘pusat area’ yang mempunyai akses yang lebih besar untuk mendapatkan ‘kue pembangunan’ dan mereka yang berada di ‘lingkar luar’ yang sulit untuk mengakses ‘kue pembangunan itu’. Di antara keduanya ada yang berada di ‘area marjinal’ yang pada satu titik tertentu mempunyai potensi untuk masuk ke ‘pusat area’.

Sedangkan bagi mereka yang berada di ‘luar area’ kemudian memunculkan budaya tertentu guna membuat kehidupan yang lebih ‘enak’ menurut versi mereka sendiri. Misalnya saja dengan mengedepankan sikap pasrah dalam menghadapi kemiskinan yang ada, yang kemudian membentuk budaya kemiskinan. Di samping itu, ada juga yang ingin memaksakan diri untuk masuk ke ‘area marjinal’ dengan melakukan tindak kejahatan, di sinilah semakin terasa migrasi desa-kota yang tak terkendali juga cenderung meningkatkan tingkat kejahatan di kota tersebut.

Dimensi Mezzo: Melemahnya *Social Trust* dalam Komunitas dan Organisasi.

Social Trust sebagai unsur pengikat suatu interaksi sosial yang ‘sehat’, dan menjadi bagian utama modal sosial, memainkan peranan penting dalam suatu upaya pembangunan. Pembangunan sulit dibayangkan akan berjalan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada *trust* antarpelaku pembangunan itu sendiri. *Social Trust* itu bukan saja berada pada dimensi vertikal (misalnya antara

pemerintah dengan warga masyarakat) tetapi juga harus ada pada dimensi yang horisontal (misalnya antarsuku yang ada di suatu komunitas). Hal ini pada akhirnya akan dapat melemahkan integrasi sosial pada komunitas, baik itu pada komunitas lokal, regional maupun nasional.

Dalam suatu organisasi, melemahnya *trust* ini antara lain muncul karena adanya tenaga-tenaga yang dianggap tidak berkompoten tetapi muncul menempati posisi tertentu. Atau karena belum adanya sistem yang baik yang dapat menampung aspirasi dari para *stakeholders* dari organisasi tersebut.

Melemahnya *trust* dalam komunitas dapat membuat masyarakat bertindak anarki. Misalnya saja, melemahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum membuat masyarakat main hakim sendiri, dan membakar pelaku kejahatan di tingkat lokal.

Melemahnya *trust* ini, seperti telah diuraikan sebelumnya, tidak jarang terkait dengan mentalitas korup yang ada pada sebagian pelaksana pembangunan, serta anggapan bahwa masyarakat itu bodoh dan akan menerima saja apa yang dikatakan. Padahal masyarakat itu juga belajar, dan salah satu yang dipelajari adalah menjadi korup. Sehingga yang terjadi adalah proses pembusukan yang terus menerus, yang pada sisi lain menimbulkan antipati masyarakat terhadap pelaku perubahan.

Dimensi Mikro: Mentalitas Materialistik dan Ingin Serba Cepat (*Instant*).

Dimensi berikutnya yang menjadi salah satu akar masalah dalam pembangunan dewasa ini adalah **berkembangnya mentalitas yang materialistik dan mentalitas ingin serba cepat (*instant*)**. Perkembangan mentalitas ini pada titik tertentu, menjadi sisi negatif yang akhirnya akan **memunculkan mentalitas korup**. Bahkan data pada tahun 2003 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-97 dari 102 negara yang dipersepsikan terkorup di dunia. Mentalitas korup sudah menjadi bagian kehidupan keseharian bangsa yang dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai korupsi 'kecil-kecilan' ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk, atau korupsi besar-besaran yang melibatkan uang ratusan milyar rupiah.

Pengembangan mental korup selama beberapa dekade ini membuat bangsa ini menjadi bangsa yang 'terkenal' untuk bidang ini. Korupsi seolah-olah sudah menjadi sarapan pagi, makan siang, dan makan malam bagi sekelompok orang di republik ini. Sehingga hampir-hampir tidak ada sektor yang tidak tersentuh oleh masalah yang keempat ini. Bahkan pada tahun 2002, departemen yang seharusnya menjadi penjaga gawang aspek mental dan spiritual pun menjadi salah satu departemen yang tertinggi dalam masalah korupsi ini.

Bencana banjir, penebangan hutan yang tidak terkendali, pengelolaan sampah dan limbah yang kurang profesional, penerimaan pegawai yang tidak berdasarkan kualitas, pemberian proyek pada rekanan yang kurang berkualitas, pemberian gelar yang memfokuskan pada aspek ekonomi tanpa melakukan edukasi, penyediaan sarana transportasi umum yang tidak memadai merupakan beberapa contoh sederhana buah dari mental korup ini. Deretan ini akan bertambah panjang kalau kita memperhatikan kehidupan keseharian di sekitar kita, yang tampaknya hampir sebagian besar terimbas dengan banyaknya mentalitas korup pada masyarakat kita. Hal yang semakin memperumit masalah adalah sudah terlatihnya para pelaku, sehingga serumit apa pun sistem dikembangkan akan selalu ada celah untuk melakukan korupsi. Akibat dari tindakan korupsi seperti ini, maka jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Masalah lain yang muncul dari mentalitas materialistik dan 'ingin serba cepat' adalah **lemahnya sumber daya manusia dan etos kerja kelompok masyarakat tertentu**. Keinginan untuk mengembangkan budaya kerja dan kemampuan yang lebih baik seringkali hanya terbatas pada keinginan saja, tetapi belum pada tingkatan upaya merealisasikannya secara serius dan konsisten. Sehingga investasi di bidang pendidikan itu menjadi kurang diperhatikan.

Hal yang muncul adalah menjadikan dunia pendidikan menjadi simbol, sehingga orang-orang berebut mendapatkan 'gelar' tetapi kurang memperhatikan (*concern*) dengan bertanggung jawab pada apa yang seharusnya ia kembangkan sejalan dengan bertambahnya 'gelar' tersebut. Sehingga yang terjadi adalah proses 'penawaran gelar' dan bukan proses pendidikan yang memberdayakan warga masyarakat. Sehingga pada titik berikutnya akan melemahkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap orang tersebut. Hal ini tentunya akan mempengaruhi dimensi pembangunan yang lain, yaitu dimensi *mezzo* dalam melihat permasalahan pembangunan dalam kaitan dengan kemiskinan (seperti sudah diuraikan di atas, yaitu melemahnya *social trust* pada komunitas dan organisasi).

3.2. Strategi Penanganan Masalah Kemiskinan

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada di atas, maka dapat dirancang bentuk intervensi sosial (*social intervention*) yang dapat dilakukan. Untuk memperbaiki kondisi yang ada saat ini, intervensi sosial yang dilakukan sekurang-kurangnya harus meliputi ketiga dimensi di atas, yaitu dimensi makro (kebijakan di tingkat provinsi ataupun antarprovinsi), dimensi *mezzo* (intervensi pada komunitas dan organisasi), serta dimensi mikro (intervensi pada individu, keluarga, dan kelompok kecil). Salah satu perubahan mendasar yang harus

dilakukan adalah perubahan strategi pembangunan pada dimensi makro.

Dimensi Makro.

Strategi pembangunan, dalam dimensi makro, yang dilakukan oleh kota-kota besar di Indonesia seharusnya lebih banyak memfokuskan pada upaya membangun masing-masing kota dengan mengikutsertakan daerah-daerah 'pemasok' migran. Sehingga kerja sama dengan pemda dati II asal migran tersebut perlu dikembangkan. Konsekuensi dari hal ini adalah perlu dialokasikannya dana guna mengembangkan daerah asal migran tersebut. Tindakan menangkap gelandangan dan pengemis dan memulangkan mereka kembali ke daerah asal tidak akan dapat memecahkan masalah, karena mereka tidak merasakannya ada daya tarik dari daerah asal yang dapat mereka kembangkan.

Sehingga suatu hal yang relatif sia-sia, jika penertiban-penertiban dilakukan tetapi tidak diidentifikasi di mana daerah asal migran tersebut; kemudian dilakukan kerja sama dengan daerah asal migran; dan dialokasikan dana yang relatif memadai untuk membangun daerah tersebut. Strategi pembangunan seperti ini memang bukan strategi jangka pendek. Tetapi hal ini merupakan strategi jangka panjang, yang harus dilakukan secara konsisten oleh berbagai kota-kota besar di Indonesia jika tidak ingin populasinya meningkat secara drastis akibat meningkatnya migrasi dari daerah ke kota-kota besar tersebut. Pengalokasian dana 20%--25% untuk pembangunan daerah asal migran, mungkin bukan kebijakan yang populer bagi seorang pejabat di tingkat kota, karena akan mengurangi anggaran pembangunan untuk kota itu sendiri. Padahal masing-masing kota merasa bahwa pembangunan di daerah mereka masih kurang. Akan tetapi, yang perlu diingat dalam strategi jangka panjang ini, adalah kesenjangan pembangunan antara daerah asal migran dan berbagai kota besar tersebut begitu besar. Sehingga atas biaya sebesar apa pun (bukan saja biaya dalam arti ekonomi, tapi juga biaya sosial dan psikologis) para migran akan berusaha untuk tetap pergi dan tinggal di berbagai kota tersebut untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak.

Bila pengalokasian dana untuk pengembangan daerah asal migran dan kerja sama dengan daerah asal migran itu tidak dapat dilakukan maka tindakan represif (misalnya dengan cara penertiban umum) ataupun *relief* (misalnya dengan cara memberikan paket bantuan) yang dilakukan tidaklah dapat mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Misalnya saja, bila di salah satu kota di Filipina (Naga City) dalam salah satu upaya mitigasi (mengurangi risiko kerusakan) terhadap bencana banjir salah satu hal yang dilakukan adalah memindahkan penduduk yang tinggal di bantaran sungai, ke daerah yang lebih aman. Sehingga aliran air sungai tidak terganggu, dan keamanan serta kenyamanan penduduk tersebut juga menjadi lebih terjamin. Apakah hal ini dapat dilakukan di Jakarta, bila

tidak dilakukan kerja sama dengan pemda asal migran tersebut? Maukah mereka kembali ke daerah mereka jika daerah mereka masih dalam kondisi seperti saat ini? Hal-hal seperti inilah yang harusnya menjadi pertanyaan guna memicu dan mengembangkan hubungan Jakarta dan daerah secara lebih proporsional.

Dalam era desentralisasi inilah, berbagai kota besar yang ada dituntut untuk mau bekerja sama dan mengembangkan jaringan (*networking*) dengan pemda daerah asal migran. Sehingga setiap kota besar dapat menjadi contoh yang baik dalam melakukan pembangunan dalam era desentralisasi ini, yaitu membangun dengan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi membangun dengan memperhatikan keseimbangan dengan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pemberian contoh meminimalkan 'egoisme' daerah ini perlu dikembangkan dalam era desentralisasi ini, guna mengembangkan model kerja sama yang produktif dan konstruktif yang tidak memusatkan kepentingan pada daerahnya sendiri tanpa memperhatikan daerah di 'sekitar'-nya.

Hal yang mirip juga dialami oleh negara yang 'sudah berkembang' (*developed countries*) ketika melakukan kontak dengan negara yang 'belum ataupun sedang berkembang' (*under-developed* atau *developing countries*). Mereka memberikan berbagai macam bantuan (baik bantuan finansial, material, dan juga bantuan teknologi serta tenaga ahli) guna meningkatkan kondisi daerah yang masih belum berkembang. Tanpa dikembangkannya berbagai jenis 'Aid' yang digunakan untuk membantu pembangunan di negara yang 'belum atau pun sedang berkembang', maka negara-negara tersebut suatu saat akan menjadi 'beban' bagi pembangunan di negara mereka. Misalnya saja, Australia tentunya akan mendapat 'beban' tambahan bila banyak migran gelap dari Indonesia yang datang ke negara mereka. Karena itu, dengan memberikan bantuan baik dalam bentuk finansial maupun bantuan tenaga ahli ataupun bantuan pengembangan sumber daya manusia dari negara yang belum dan sedang berkembang (misalnya melalui program beasiswa pendidikan), mereka tentunya berharap bahwa Indonesia akan dapat berkembang dengan baik dan tidak membebani mereka. Lebih jauh lagi adalah terjalin hubungan yang positif antar negara, di mana *image* Australia di mata Indonesia juga semakin positif. Di samping itu, citra Australia di berbagai negara yang lain juga semakin positif, karena ia menjadi negara yang suka membantu negara yang lain.

Di sinilah dapat dirasakan betapa perlunya dikembangkan 'program bantuan pengembangan daerah' (*aid*), karena ia bukan saja berfungsi untuk mengatasi masalah yang ada. Tetapi juga dapat memberikan citra positif dalam hubungan antardaerah.

Sehingga kota-kota besar tidak dianggap sebagai kota yang sombong dan mementingkan diri sendiri. Atau kota yang 'semau gue' yang tidak peduli pada kelangsungan hidup daerah lain.

Hal yang perlu diingat di sini adalah, **'program bantuan pengembangan daerah' bukanlah suatu bantuan yang bersifat *charitative* (amal) belaka, tetapi ia merupakan program yang terencana untuk mengembangkan suatu daerah.** Karena itu, ia harus ditangani secara serius dan berkesinambungan. Dan bukan sekedar memberlakukan program tersebut sebagai proyek-proyek yang tidak mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Dimensi Mezzo.

Sejalan dengan arah perubahan pada dimensi makro yang lebih menekankan pada upaya pengembangan daerah melalui kebijakan desentralisasi serta mengaitkan pembangunan suatu daerah dengan daerah yang lain. Maka berbagai institusi terkait (baik itu lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah maupun dunia usaha) diharapkan lebih memperhatikan proses pengembangan daerah asal migran dibandingkan dengan upaya pembangunan yang hanya memfokuskan pada pemberian paket bantuan penambahan modal (*income generating*) yang ternyata tidak mengangkat masyarakat dari ekonomi subsisten.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan *trust* pada masyarakat, maka pada tingkat organisasi perlu juga dilakukan *capacity building*, terutama dalam kaitan mengembangkan pelaku perubahan yang lebih bergaya partisipatif dibandingkan instruktif, agar tenaga yang menangani permasalahan tersebut mempunyai kemampuan sesuai yang dibutuhkan. Kehadiran tenaga yang mempunyai kemampuan dan mau melakukan kontak dengan masyarakat secara partisipatif (dan bukan instruktif) merupakan salah satu kunci mengembangkan kembali kepercayaan masyarakat.

Di samping itu, proses *capacity building* pada organisasi yang memberikan layanan guna mengentaskan kemiskinan diprasyaratkan untuk membuat jaringan (*networking*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses *capacity building*. Di sinilah keterkaitan antara organisasi pemerintah (GOs), organisasi non-pemerintah (NGOs) dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu daerah. Jaringan yang terjalin tidak bermakna kalau program yang dilakukan di tingkat komunitas saling tumpang tindih dan justru membuat masyarakat semakin memiliki ketergantungan terhadap organisasi yang ada. Misalnya saja, pada masyarakat miskin yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung tidak jarang mendapatkan bantuan sembako dari berbagai NGOs. Sehingga meskipun ada program dari GOs ataupun NGOs lain yang ingin membantu mereka untuk kembali ke daerah asal mereka, pada

akhirnya mereka merasa tetap 'betah' untuk berada di bantaran sungai Ciliwung. Karena mereka merasa masih banyak bantuan dan kemudahan yang akan ia dapatkan kalau tetap berada di bantaran kali tersebut, dibandingkan kalau mereka harus kembali ke kampung mereka.

Dimensi mikro.

Tetapi Perubahan dalam dimensi Makro haruslah diikuti dengan perubahan terhadap dimensi mikro. Tanpa adanya perubahan pada sikap dan perilaku dari pelaku perubahan (dalam hal ini pelaku perubahan dari unsur pemerintah, NGOs maupun dunia swasta) maka sulit pembangunan dalam dimensi makro akan dapat berjalan dengan baik.

Bila aparat pada organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah maupun dunia usaha, serta masyarakat di tingkat *grass-root* sebagai *stake-holders* pembangunan masih mendukung pada pengembangan mentalitas korup. Maka yang terjadi tetapih pembusukan dari dalam. Berbagai sistem pengawasan sudah dicoba dikembangkan selama beberapa dekade pembangunan. Tetapi yang terjadi adalah semakin mengasah keterampilan dari mereka yang ingin memanfaatkan situasi, akibat masih cukup banyaknya pelaku perubahan yang bermentalitas korup.

Dalam kaitan dengan hal ini, upaya pembangunan yang memfokuskan pada perbaikan mentalitas pelaku perubahan akhirnya tidak boleh dilalaikan. Bila hal ini dilalaikan, maka yang terjadi adalah kebocoran demi kebocoran, yang akhirnya menjadi proses alih 'teknologi' dalam menggerogoti anggaran pembangunan dari satu generasi ke generasi yang lain. Perbaikan sistem pengawasan yang ada, haruslah diikuti dengan upaya perbaikan mentalitas materialistik dan ingin serba cepat yang banyak merasuki masyarakat kita. Hal ini bukan berarti, bahwa materi itu tidak penting. Akan tetapi, perubahan itu memerlukan tahapan tersendiri dan 'keserakahan' itu justru dapat menghancurkan. Hal-hal itu juga perlu diingat kembali oleh mereka.

Di sini, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan masyarakat (*community education*) dan pemasaran sosial haruslah diikuti dengan perilaku yang diawali dari tingkat individu pelaku perubahan itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat merasa yakin bahwa mereka saat ini tidak sedang dibohongi, baik oleh elite di pemerintahan, organisasi non-pemerintah, swasta maupun elite di tingkat lokal.

4. Kesimpulan

Strategi yang dikembangkan di atas, pada dasarnya merupakan *general strategy* yang harus dikembangkan secara konsisten dan berkesinambungan pada ketiga

dimensi yang ada. Karena perbaikan pada satu dimensi saja, tidaklah akan dapat memberikan efek yang bermakna bagi pengurangan angka kemiskinan di tingkat nasional. Di samping itu, pembangunan yang ada juga harus memperhatikan berbagai sektor pembangunan yang ada, dan jangan hanya berfokus pada satu sektor saja. Misalnya saja, memfokuskan pada sektor ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan, yang pada akhirnya dapat mendatangkan berbagai bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Karena tragedi bencana banjir dan tanah longsor seperti yang terjadi di Jember (Jawa Timur) dan Banjarnegara (Jawa Tengah) pada awal tahun 2006 ini tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan dan keserakahan (mentalitas yang ingin mendapatkan materi dengan cepat) dalam mengeksploitasi lingkungan hidup mereka.

Berdasarkan hal di atas, maka program penanganan kemiskinan sebaiknya tidak dilepaskan dari program pembangunan secara keseluruhan. Karena yang menjadi akar masalah itu bukanlah kemiskinan itu sendiri. Tetapi kemiskinan merupakan *symptom* (gejala) dari adanya kesenjangan pembangunan di berbagai bidang yang terjadi antara kota-kota besar dan daerah asal migran tersebut. Pilihan untuk menggunakan strategi yang memfokuskan pada *relief* dan rehabilitatif atau lebih memfokuskan pada program preventif, mitigasi dan *developmental* yang multi sektor, multidimensi dan *multilevel intervention* tersebut merupakan pilihan yang harus diambil oleh pemerintah sebagai pengembalian amanah pembangunan, yang tentunya juga dibantu dengan *stake-holders* yang lain.

Daftar Acuan

Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

_____. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. edisi revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Harris, John. 2001. *Depoliticizing Development, the World Bank and Social Capital*. New Delhi: Leftword Books.

Ife, Jim. 1997. *Rethinking Social Work, towards critical practice*. Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty Limited.

_____. 2002. *Community Development*. 2nd edition. Sydney: Pearson Education Australia Pty Ltd.

Midgley, James. 1995. *Social Development, the Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.

Elliot, Doreen. 1993. "Social Work and Social Development", dalam *International Social Work*, Vol.36.

UN-ESCAP. *ESCAP Training in Social Development*

UNDP. *Human Development Reports 2005*

"Human Development Indicators", dalam <http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_HDI.pdf> diakses 7 Januari 2006